

Laporan Penelitian
**PRASANGKA DAN PERMUSUHAN
ANTAR KELOMPOK**



Oleh
Faturochman

Dilaksanakan atas Biaya
Dana OPF tahun 1993/1994

Fakultas Psikologi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
1993

KATA PENGANTAR

Secara normatif, prasangka buruk dan permusuhan tidak boleh berkembang di masyarakat. Pada kenyataannya, kedua hal tersebut selalu ada dan sering berakibat buruk. Dua keadaan yang berbeda inilah yang merangsang peneliti untuk mendalami masalah prasangka dan permusuhan.

Sesuai dengan judulnya, penelitian ini menekankan bahasan prasangka dan permusuhan yang terjadi pada kehidupan antar kelompok. Akan tetapi secara teoritis keduanya bisa terjadi pada tingkat hubungan antar individu. Oleh karena itu di dalam penelitian ini juga masih ada pembahasan tentang prasangka dan permusuhan antar individu dengan porsi bahasan yang lebih sedikit. Maksud dimasukkannya bahasan pada level individu adalah untuk melengkapi pemahaman tentang permasalahan yang dibahas sekaligus untuk membandingkannya dengan level kelompok.

Penelitian ini berlangsung berkat bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang besar kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian. Pertama, terima kasih diucapkan kepada pihak Fakultas Psikologi UGM selaku pengelola dana OPF. Kedua, peneliti juga berterima kasih kepada Dr. Dalil Adisubroto yang bersedia membimbing peneliti. Tanpa bimbingan ini peneliti akan mengalami kesulitan untuk serta dalam penelitian karena pangkat dan jabatannya masih rendah. Ketiga, kepada pihak-pihak yang secara tidak langsung membantu penelitian ini peneliti juga mengucapkan terima kasih. Di antara mereka adalah majalah Tempo yang telah memuat berita-berita yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai objek pembahasan.

Semoga penelitian ini bermanfaat.

Yogyakarta, Oktober 1993

Faturochman

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
INTISARI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1. Prasangka	4
2.2. Permusuhan	11
2.3. Mengatasi Prasangka dan Permusuhan	16
BAB III METODE	20
BAB IV HASIL-HASIL PENELITIAN	22
4.1. Kasus I	22
4.2. Kasus II	24
4.3. Kasus III	28
BAB V PENUTUP	31
5.1. Kesimpulan	31
5.2. Implikasi	33
DAFTAR PUSTAKA	34

INTISARI

Secara teoritis ada dua pandangan pokok tentang prasangka dan permusuhan dalam interaksi sosial. Pandangan pertama menekankan bahwa prasangka pada dasarnya ditentukan oleh ciri kepribadian individu, oleh karena itu prasangka lebih mudah dipahami dalam interaksi sosial antar individu. Pandangan kedua melihat bahwa interaksi sosial pada hakekatnya adalah interaksi antar kelompok, sehingga analisis tentang prasangka dan permusuhan seharusnya dilakukan dalam konteks antar kelompok.

Kedua pandangan tersebut tampaknya bertentangan, tetapi sebenarnya satu dengan lainnya saling mengisi dalam menerangkan prasangka dan permusuhan. Pada tingkat individu prasangka tidak tuntas dipahami bila tidak mengaitkannya dengan latar belakang kelompok sosialnya. Demikian juga di dalam kelompok ada partikularisasi atau perbedaan individual dalam berprasangka dan bermusuhan dengan kelompok lain. Bisa juga ditambahkan bahwa karakteristik individu yang cenderung berprasangka buruk juga bisa mempengaruhi kelompok tempat individu tersebut berafiliasi, terutama bila individu yang bersangkutan menjadi pemimpin. Contohnya adalah Hitler.

Penelitian ini menekankan analisis prasangka dan permusuhan antar kelompok karena dalam kehidupan sehari-hari tampak lebih menonjol dibanding prasangka dan permusuhan antar individu. Namun demikian penelitian ini tidak mengabaikan bahasan yang menekankan individu, baik dalam teorisasi, telaah kasus, maupun implikasinya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu fenomena sosial yang menarik di Indonesia adalah adanya keragaman budaya. Aneka kebudayaan yang bermacam-macam tersebut tetap melekat di daerah dan komunitas tertentu serta mempengaruhi perilaku orang-orang yang hidup dalam budaya tersebut maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Perbedaan budaya yang ada antara lain ditandai dengan perbedaan bahasa, struktur sosial, struktur ekonomi, norma-norma, gaya interaksi sosial, pemikiran, dan juga agama.

Bagaimana interaksi antar individu atau antar kelompok yang memiliki latar belakang berbeda-beda tersebut? Dalam rangka menjawab pertanyaan ini biasanya diacu dua sudut pandang. Pertama dipandang dari ideologi dan kedua dipandang dari segi kenyataan (empiris). Secara ideologis, negara dan masyarakat Indonesia sangat menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Tujuan dari penghargaan tersebut adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini jelas sekali diungkapkan dalam landasan Bhineka Tunggal Ika.

Berlandaskan pada hal tersebut maka konflik atau permusuhan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan secara ideologis tidak dibenarkan. Keharmonisan hubungan sosial menjadi prioritas utama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian tidak berarti bahwa pada kenyataannya tidak terdapat konflik-konflik yang berlatar belakang perbedaan budaya. Istilah SARA (suku, agama, ras, antar golongan) yang sangat dikenal sekaligus sangat hati-hati dipakainya. Pemakaian yang sangat hati-hati ini mencerminkan adanya potensi konflik yang dengan intensitas yang dalam. Permasalahan SARA yang sering muncul adalah perbedaan pendapat antara Islam dengan Kristen dalam bidang agama, golongan kaya dengan miskin, dan Cina dengan pribumi (Budiman, 1993). Pada masing-masing kelompok besar itu sendiri juga sering ditemui adanya perbedaan-perbedaan pandangan yang mengarah kepada permusuhan. Sebagai contoh yang banyak

dipublikasikan dalam berbagai media massa yang belum lama ini terjadi adalah konflik pada kelompok Huria Batak Kristen Indonesia.

Dalam skala yang lebih kecil permusuhan antar kelompok juga muncul. Perkelahian antar sekolah yang sering terjadi di Jakarta pada awalnya adalah bentuk konflik yang kecil, tetapi sekarang makin sadis bentuknya. Perkelahian antar pendukung kesebelasan daerah dalam kompetisi sepakbola masih juga sering terjadi.

Bila berbagai masalah tersebut didokumentasi, maka akan tampak bahwa pada dasarnya pertentangan antar kelompok, konflik sosial, dan permusuhan selalu muncul dari waktu ke waktu. Di sisi lain ada kecenderungan untuk menutupi permasalahan tersebut agar keserasian hubungan sosial lebih menonjol. Tindakan ini tampaknya bertujuan baik, tetapi bisa juga diinterpretasikan bahwa tindakan yang dilakukan sebenarnya adalah menghindari kenyataan. Dengan kata lain, keserasian yang ada sifatnya semu karena penekanan dalam menghadapinya tidak pada cara-cara mengatasinya, tetapi pada cara-cara menutupi adanya peristiwa-peristiwa itu. Dari segi pengembangan ilmu hal seperti ini kurang menguntungkan karena berarti ada pemiskinan kesempatan untuk mengkaji masalah-masalah aktual.

Cara-cara pemecahan masalah yang demikian itu justru dapat menimbulkan prasangka buruk di antara kelompok-kelompok yang terlibat. Prasangka ini bisa menjadi penyebab yang laten bagi munculnya permusuhan antar kelompok di masa-masa mendatang. Dengan demikian bila usaha-usaha untuk mengatasi permusuhan tersebut tidak tuntas maka akan terjadi lingkaran setan, sebab dan akibat menjadi sulit dipisahkan.

Bila dilihat kembali terjadinya permusuhan-permusuhan tersebut maka akan terlihat bahwa penyebab awalnya adalah perbedaan atribut kelompok seperti cina, pribumi, Islam, Kristen, dan sebagainya. Apa yang melatar belakangi atau yang mendorong perbedaan-perbedaan tersebut menjadi bentuk pertentangan? Jawaban atas pertanyaan ini secara umum bisa diterangkan dari dua sisi, yaitu teoritis dan analisis empiris. Oleh karena itu dalam rangka memahami permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha untuk menjawab

pertanyaan di atas secara teoritis dengan beberapa hasil analisis data empiris sebagai pelengkap.

1.2. Tujuan

Penelitian ini diarahkan untuk memahami fenomena prasangka dan permusuhan yang sering terjadi di masyarakat. Untuk memahaminya maka di samping mengkaji dinamika persoalan yang ada perlu juga dikaji dengan menggunakan kerangka teori tertentu. Oleh karena itu secara sistematis penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal berikut ini:

1. Mengkaji secara teoritis masalah prasangka sosial dan permusuhan.
2. Memahami berbagai kasus prasangka dan permusuhan dengan kerangka teori yang ada.
3. Mengkaji keterkaitan antara prasangka sosial dengan permusuhan melalui analisis kasus-kasus aktual.

LANDASAN TEORI-TEORI

2.1. Prasangka

Secara garis besar interaksi sosial bisa digolongkan sebagai bentuk hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Variasi dari kedua bentuk interaksi tersebut bisa dalam bentuk hubungan antar individu dalam kelompok serta hubungan antara individu dengan kelompok.

Dalam konteks interaksi sosial, prasangka bisa dilihat sebagai komponen perilaku antar individu maupun antar kelompok. Sebenarnya kedua bentuk interaksi tersebut tidak berbeda secara menyolok. Akan tetapi ada perspektif yang melatar belakangnya yang berbeda secara menyolok dalam melihat hakekat interaksi sosial. Di satu sisi ada pandangan bahwa interaksi sosial pada dasarnya adalah interaksi antar individu, di sisi lain ada pandangan bahwa interaksi sosial secara kontekstual merupakan interaksi antar kelompok.

Pandangan pertama menekankan bahwa unit terkecil dari masyarakat adalah individu. Setiap individu memiliki karakteristik personal yang khas dan berbeda dengan individu lainnya. Oleh karena itu eksistensi masing-masing individu di dalam masyarakat harus diperhitungkan. Konsekuensi lebih lanjut dari pandangan ini adalah meletakkan individu sebagai suatu unit yang penting di dalam melihat interaksi sosial.

Menurut pandangan kedua interaksi sosial bisa saja dalam bentuk hubungan antar individu. Namun demikian, masing-masing individu tidak pernah bisa lepas dari identitas sosial (Tajfel, 1982), terutama dalam melakukan interaksi sosial. Identitas sosial itu sendiri di dapatkan karena keterlibatan individu dalam kelompok sosial. Oleh karena itu interaksi antar individu sebagian besar merupakan bentuk interaksi antar kelompok. Bisa dicontohkan bahwa pria dan wanita yang baru berkenalan bisa dipandang sebagai interaksi antar kelompok. Dalam hal ini yang satu dianggap mewakili kelompok pria sedangkan

yang lain mewakili kelompok wanita. Bahkan menurut pandangan ini secara kognitif sulit untuk menyebut kapan terjadi hubungan antar individu yang benar-benar murni.

Berdasarkan pada dua asumsi tersebut di atas, prasangka sosial bisa merupakan prasangka antar individu dan antar kelompok. Bila dilihat dari perkembangan konsep-konsep dan teori-teori prasangka maka cara analisis prasangka bisa dikategorikan seperti ini. Namun di sisi lain ada juga teori yang berorientasi pada individu, dalam arti konsentrasi bahasannya pada berbagai aspek individu, tetapi kerangka interaksinya adalah antar kelompok.

Teori prasangka yang individualis sifatnya antara lain dikemukakan oleh Adorno dkk. (1950). Menurut mereka prasangka berkaitan erat dengan karakteristik individu. Karakteristik yang paling kuat mendorong munculnya prasangka adalah *authoritarian personality*. Senada dengan pendapat Adorno dkk., Allport (1954) berpendapat bahwa karakteristik tersebut ditandai oleh cara berpikir yang berbeda dibanding orang yang toleran. Cara berpikir orang yang berprasangka adalah kaku dan tidak toleran.

Teori Adorno dkk. banyak dipengaruhi oleh psikoloanalisis. Menurut mereka kepribadian otoriter berkembang sebagai akibat dari pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan. Orang-orang yang otoriter pada masa kecilnya dididik dalam keluarga yang menerapkan pola asuh otoriter.

Sebagai suatu teori yang berkembang sesudah perang dunia kedua, argumen-argumen yang digunakan dalam teori ini banyak bertitik tolak dari pengalaman bangsa Yahudi yang dianiaya oleh Nazi. Pemimpin-pemimpin Nazi, terutama Hitler, adalah contoh pemimpin yang otoriter. Mereka menerapkan pola kepemimpinan seperti itu karena pada waktu kecil mereka sering mendapatkan hukuman dari orangtuanya, terutama hukuman fisik. Dengan demikian keotoriteran mereka dapat dikatakan sebagai bentuk pembalasan terhadap apa yang telah mereka dapatkan pada waktu kecil.

Apabila asumsi di atas bisa diterima, maka prasangka dan permusuhan antara Israel (Yahudi) dengan Palestina selama bertahun-tahun juga bisa dipahami dengan konsep

tersebut. Perbedaannya terletak pada pihak yang menerapkan kepemimpinan otoriter. Pada waktu perang dunia kedua Nazi memperlakukan orang-orang Yahudi secara kejam, sedangkan hingga tahun-tahun terakhir ini bangsa Yahudi memperlakukan bangsa Palestina secara semena-mena. Hal ini bisa diinterpretasi bahwa kekejaman pemimpin Israel merupakan hasil dari pengalaman mereka diperlakukan semena-mena di masa lalu atau sebagai suatu bentuk balas dendam *displacement*. Di sisi lain, bangsa Palestina merupakan *the victims of the victims* (Said dalam Mohamad, 1993).

Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan dan konflik-konflik yang dialami pada dasarnya tidak selalu bermuara pada karakteristik otoriter. Pengalaman tersebut bisa menghasilkan karakteristik otoriter bila individu yang mengalaminya tidak mampu melakukan penyesuaian dalam bentuk *coping behaviour*. Mereka menghadapi pengalaman negatif dan menyelesaikannya dengan pola-pola perilaku defensif.

Di sisi lain karakteristik otoriter juga cenderung muncul pada orang-orang yang orientasinya terhadap kekuasaan dan status kuat. Orientasi yang demikian ini mengarah pada hubungan yang hirarkhis dengan memperhitungkan kekuatan-kekuatan sosial. Tujuan akhirnya adalah mencapai hirarkhi yang tinggi yang berarti memiliki kekuasaan tinggi dan kekuasaan ini bisa digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Bila tujuan tersebut tidak tercapai, maka kekuasaan yang dimiliki bisa digunakan untuk menekan. Dengan demikian pemaksaan melalui kekuasaan (otoritas) merupakan hasil dari sederetan proses.

Karena memiliki kekuasaan, maka ada pihak lain yang dikuasai. Ditinjau dari kekuasaan sosial, mereka yang dikuasai tersebut memiliki kekuatan yang lebih lemah. Mereka inilah yang sering menjadi sasaran atau menjadi objek prasangka negatif (Adorno dkk., 1950). Bisa juga terjadi bahwa yang menjadi sasaran prasangka tersebut merupakan sasaran agresivitas. Mereka berasumsi bahwa dalam perimbangan kekuatan pihak yang lemah harus menanggung berbagai hal negatif, termasuk menjadi sasaran agresi.

Pada perkembangannya teori tersebut memasukkan perbedaan individu dalam menganalisis prasangka (Aboud, 1988). Meskipun prasangka menurut teori ini merupakan

inner state, tetapi tidak semua orang memilikinya dalam ukuran yang sama. Menurut teori ini perbedaan individu tersebut muncul sebagai akibat perbedaan pengalaman.

Pemahaman tentang individu yang berprasangka seperti disebutkan di atas bisa diperkaya dengan *Belief Congruence Theory* (Rokeach, 1960). Menurut teori ini ada sebagian orang yang *closed-mindedness* atau dogmatis. Dogmatisme didefinisikan sebagai pola berfikir yang dicirikan oleh kekakuan dan kurang toleransi terhadap situasi yang bermasalah. Pola berpikir ini erat kaitannya dengan keyakinan-keyakinan tentang kekuasaan. Keyakinan tersebut biasanya muncul dalam interaksi sosial. Individu yang dogmatis biasanya melakukan hubungan sosial dengan orang yang memiliki keyakinan sama. Tujuan dari pemilihan orang dalam interaksi sosial ini adalah untuk validasi atau justifikasi nilai-nilai yang mereka yakini.

Berhubungan dengan orang lain yang memiliki nilai-nilai atau keyakinan yang sama berarti membangun kongruensi keyakinannya. Sebaliknya, akan terjadi inkongruensi bila melakukan interaksi mendalam dengan orang yang keyakinannya berbeda. Salah satu cara yang mudah untuk menghindari inkongruensi adalah dengan tidak melakukan hubungan dengan orang yang berlainan keyakinannya. Inkongruensi ini akan mendorong prasangka buruk terhadap pihak lain karena berbeda keyakinan dan menganggap keyakinan pihak lain tersebut tidak benar. Tentu saja hal ini terjadi karena *closed-mindedness*. Pada orang yang terbuka menerima orang lain akan terjadi persepsi yang tidak lebih objektif.

Bila antara teori Adorno dkk. dengan teori Rokeach dibandingkan, perbedaan yang menonjol adalah pada sasaran prasangka. Bila pada orang yang otoriter sasaran prasangkanya adalah pihak yang tidak punya otoritas atau submisif, maka pada orang dogmatis sasaran tersebut adalah orang yang memiliki nilai-nilai berbeda. Pandangan yang kedua ini lebih spesifik.

Perbedaan yang lain adalah pada titik tekan analisisnya. Menurut Adorno dkk. (1950) prasangka sifatnya sangat individual, sedangkan menurut Rokeach (1960) mungkin saja terjadi prasangka tersebut antar kelompok. Meskipun demikian kedua teori tersebut

sama-sama bertolak dari analisis individu. Oleh karena itu Milner (1981) menyebut teori kongruensi keyakinan sebagai teori interpersonal dari interaksi antar kelompok.

Berbeda dengan pandangan yang individualis seperti disebutkan di atas, pandangan yang lebih menekankan pada kelompok menilai bahwa prasangka pada dasarnya adalah proses interaksi antar kelompok (Babad dkk., 1983). Salah satu hal yang menjadi asumsi adalah kenyataan bahwa orang yang otoriter maupun tidak akan mudah berprasangka dalam situasi konflik, terutama konflik antar kelompok. Hal ini pernah dibuktikan oleh Sherif dan Sherif (1969) yang merupakan pelopor dalam kajian interaksi antar kelompok. Mereka menyimpulkan berdasarkan percobaan bahwa *conflict of interest* antar kelompok adalah sumber prasangka. Konflik itu sendiri muncul dalam suasana hubungan antar kelompok yang kompetitif. Anggapan bahwa suasana kompetisi menciptakan ketegangan hubungan antar kelompok juga sepaham dengan teori perbandingan sosial (Festinger, 1954).

Meskipun sama-sama beranggapan bahwa prasangka pada dasarnya adalah terjadi di dalam dan akibat dari hubungan antar kelompok, Billig (1973) berargumen bahwa kompetisi bukan prasyarat munculnya sikap negatif antar kelompok. Menurut dia yang penting dalam hubungan antar kelompok adalah kategorisasi dan identitas sosial. Sebagai contoh dia menyebutkan bahwa pembentukan kelompok dalam eksperimen Sherif dan Sherif menciptakan kategorisasi dan identitas sosial yang mendahului kompetisi. Kategorisasi dan identitas sosial ini lebih dulu menentukan sikap-sikap di dalam kelompok dan sikap terhadap kelompok lain. Kompetisi yang muncul kemudian memang memperbesar atau memacu munculnya sikap-sikap tersebut.

Menurut Billig dan Tajfel (1973), kategorisasi dalam hubungan antar kelompok akan menumbuhkan favouritisme terhadap kelompok di mana seseorang menjadi anggota di dalamnya. Proses ini kemudian dikenal dengan adanya pemisahan *ingroup-outgroup*, terutama dalam keanggotaan. Pemisahan itu kemudian berkembang lagi menjadi bentuk diskriminasi.

Salah satu bukti menonjol yang ditunjukkan untuk membuktikan bahwa kategorisasi merupakan faktor dasar dalam hubungan antar kelompok adalah *minimal group paradigm*. Secara singkat paradigma kelompok minimal ini adalah suatu kategorisasi sederhana di mana orang dimasukkan dalam kelompok-kelompok tertentu yang baru yang anggota-anggotanya belum kenal satu sama lainnya. Kelompok-kelompok tersebut kemudian diberi nama *hanya sekedar nama*. Masing-masing kelompok kemudian diberi tugas yang menyangkut kelompoknya sendiri dan kelompok lain. Fenomena yang muncul ternyata cukup mengejutkan. Meskipun anggota-anggota dalam satu kelompok belum saling mengenal dan belum ada struktur, hanya ada nama kelompok dan tugas sederhana, muncul *ingroup favouritism* yang menonjol. Hal inilah yang dianggap sebagai awal dari perbedaan antar kelompok.

Pada perkembangan selanjutnya fenomena tersebut menjadi dasar untuk kategorisasi diri dalam kehidupan sehari-hari bagi seseorang maupun sekelompok orang. Sebagai contoh, seseorang akan mengklasifikasikan dirinya sebagai seorang wanita, berkebangsaan Indonesia, dari suku Jawa, berpendidikan sarjana, belum menikah, dan seterusnya. Kategorisasi seperti itu akan lebih jelas bila berhubungan dengan orang lain terutama yang berbeda kategori sosialnya. Meskipun dalam interaksi sosial tersebut berbentuk interpersonal, pada dasarnya dua orang yang bertemu itu merupakan wakil dari masing-masing kelompoknya.

Ada satu kelemahan yang menonjol bila memandang hubungan seperti disebutkan di atas sebagai bentuk hubungan antar kelompok. Kelemahan tersebut adalah kurang jelasnya pengertian kelompok. Laki-laki dan perempuan, misalnya, bisa disebut sebagai kelompok, bisa juga tidak. Barangkali lebih tepat bila hal itu disebut sebagai identitas sosial. Inilah yang merangsang munculnya teori identitas sosial.

Identitas sosial didefinisikan sebagai bagian dari konsep diri seseorang yang muncul dari pemahaman atau kesadarannya sebagai anggota suatu golongan, kategori atau kelompok di mana keanggotaan tersebut memberi pengaruh pada nilai-nilai dan emosi

orang yang bersangkutan (Tajfel, 1982, h. 225). Dengan demikian keanggotaan suatu kategori akan memberi sumbangan yang besar terhadap identitas sosial seseorang. Tentu saja hal tersebut bisa dicapai bila identitas yang diperoleh adalah identitas positif (Turner, 1982).

Sampai di sini muncul permasalahan baru: "bagaimana seseorang mendapatkan identitas sosial yang positif?" Salah satu cara yang paling sering dilakukan adalah dengan perbandingan sosial. Oleh karena itu konsep ini dikembangkan menjadi kategori-identitas-komparasi sekaligus (*Category Identity Comparison, CIC*).

Secara umum telah dikemukakan tentang teori identitas sosial dan hal-hal yang terkait. Bagaimana teori ini bisa untuk memahami prasangka?

Telah disebutkan bahwa kategorisasi akan memunculkan diskriminasi antar kelompok. Hal ini bisa diinterpretasikan bahwa kategorisasi bisa menimbulkan prasangka sebab diskriminasi muncul sebagai akibat atau bersamaan dengan prasangka (Crosby dan Gonzales-Intal, 1984). Meskipun demikian ada yang berpendapat (lihat Brewer, 1979; Brewer dan Kramer, 1985) bahwa kategorisasi akan mempertinggi *ingroup favouritism* tetapi tidak berarti menyebabkan pandangan jelek terhadap kelompok lain. Kedua pandangan yang berbeda ini bisa sama-sama benar sebab keduanya berangkat dari asumsi yang berbeda. Selain itu, pada keduanya masih ada hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam kajian teorinya. Menurut pandangan atau teori identitas sosial keduanya belum memasukkan konsep diri. Artinya, bila konsep diri dipertimbangkan, maka akan jelas hubungan antara kategorisasi dan prasangka. Pada orang-orang yang konsep dirinya tidak kuat kemungkinan besar akan muncul prasangka yang jelek terhadap kelompok lain. Di sini terdapat sintesa pandangan antara Adorno dkk (1950) dan Rokeach (1960) di satu sisi dengan Billig dan Tajfel (1973) serta Turner (1975) di sisi lain. Pandangan yang menekankan analisis prasangka sebagai bentuk hubungan antar kelompok dilengkapi pandangannya dengan mempertimbangkan pandangan yang menekankan prasangka sebagai karakteristik individu. Billig (1985) menyebutkan bahwa kategorisasi dan identitas sosial

nya tidaklah cukup. Satu hal lagi perlu ditambahkan, yaitu partikularisasi. Artinya ada karakteristik individu dan bahkan karakteristik itu bisa dibangun dalam kelompok yang menyebabkan munculnya prasangka terhambat.

2.2. Permusuhan

Secara konseptual prasangka dan permusuhan adalah beda. Prasangka merupakan konsep yang lebih luas daripada permusuhan. Prasangka buruk belum tentu berarti permusuhan. Oleh karena itu untuk permusuhan perlu dikaji juga konsep-konsep lain selain prasangka untuk menerangkan permusuhan.

Permusuhan secara awam sering disamakan dengan konflik sosial yang berarti pertemuan dua pihak atau lebih yang diwarnai oleh pertentangan (Sairin dan Semedi, 1992). Ada beberapa sumber yang bisa menyulut pertentangan di samping latar belakang psikologis seperti yang telah dikemukakan di bagian terdahulu. Sairin dan Semedi (1992) menggolongkan tiga sumber pertentangan yang menonjol. Pertama adalah perebutan sumber daya, kesempatan ekonomis dan alat-alat produksi. Kedua, batas-batas kelompok sosial merupakan sumber permusuhan yang cukup menonjol. Ketiga, sumber-sumber gangguan akibat benturan struktur kebudayaan seperti nilai-nilai, ideologi dan agama.

Dari ketiga sumber tersebut sumber yang ketiga telah banyak dibahas pada kajian kategorisasi dan identitas sosial. Oleh karena itu pada kesempatan ini akan lebih banyak diraikan kajian sumber-sumber permusuhan yang pertama dan yang kedua.

Di dalam psikologi bahasan tentang perebutan sumber daya telah dibahas oleh Lorenz (1966). Ada dugaan bahwa permusuhan yang bersumber pada masalah ini merupakan yang paling banyak terjadi. Permusuhan yang muncul biasanya karena ada satu objek sumber daya yang dikehendaki oleh dua kelompok. Apabila sumber banyak, meskipun hanya satu jenis, maka permusuhan tidak akan cepat terjadi. Ketika sumber tersebut makin menipis jumlahnya, maka ada satu pihak atau semua pihak yang terlibat yang merasa terancam sumber kehidupannya. Perasaan tidak aman inilah yang secara psikologis akan mengikis rasa solidaritas dan kerja sama.

Pandangan di atas menekankan pada asumsi manusia sebagai homo ekonomikus. Pada kenyataannya mekanisme yang terjadi tidak sekaku itu. Artinya, tidak selamanya sumber yang sedikit jumlahnya otomatis akan menjadi bahan rebutan. Ada bukti-bukti (lihat Sairin dan Semedi, 1992) bahwa pada masyarakat dengan pola hidup yang sederhana lebih mampu menghindari dari permusuhan. Salah satu peredamnya adalah rasa memiliki identitas yang sama atau perasaan senasib. Rasa permusuhan akan cepat muncul ketika salah satu kelompok memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari kelompok lain sehingga kelompok yang lemah merasa ditekan atau dirugikan. Protes para nelayan tradisional terhadap pemakaian pukat harimau oleh para nelayan kaya adalah contoh nyata yang terjadi beberapa tahun lalu.

Permusuhan karena batas sosial bisa sangat luas cakupannya. Namun untuk menjelaskannya akan diuraikan dulu permusuhan yang terjadi karena perbatasan fisik.

Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia ini sudah banyak terjadi peperangan yang berawal dari masalah perbatasan. Pokok masalah sebenarnya tentu saja bukan perbatasan itu sendiri, tetapi wilayah yang pada umumnya mengandung sumber daya tertentu. Dalam hal ini perbatasan diartikan sebagai tanda wilayah kekuasaan. Menyempit dan meluasnya wilayah kekuasaan akan ditandai oleh perubahan batas-batas yang ada. Dengan adanya perbatasan ini maka akan jelas di mana satu kekuatan punya kewenangan secara penuh yang tidak bisa diganggu oleh pihak lain. Apabila ada satu wilayah di dalam wilayah yang lebih besar, maka pemegang kekuasaan di wilayah yang lebih kecil ini harus mengikuti penguasa yang lebih besar.

Pemahaman batas sosial bisa analog dengan perbatasan fisik seperti di atas. Dalam teori identitas sosial dikemukakan bahwa antara satu kelompok sosial dengan kelompok lainnya ada batas-batas sosial yang jelas. Terlebih lagi bila pada masing-masing kelompok sosial sudah terjadi kohesivitas atau salinasi yang tinggi. Pada kelompok yang demikian itu akan tampak suatu identitas yang sangat kuat sehingga bila ada kelompok lain yang berbeda identitasnya maka akan tampak perbedaan keduanya juga sangat jelas.

Pada kenyataannya batas sosial memang tidak berbeda sejelas dan setajam batas fisik. Sebagai contohnya adalah perbedaan agama. Islam dan Kristen secara akidah berbeda dengan sangat menyolok. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak berarti membawa aspek-aspek sosialnya berbeda sama sekali. Di antara dua agama besar tersebut banyak kesamaan dalam hal pandangan kemasyarakatannya.

Dua kelompok sosial seperti dicontohkan di atas akan makin tampak berbeda bila ada aspek-aspek penting lainnya yang juga berbeda. Misalnya, batas sosial agama akan menjadi lebih jelas bila dibarengi adanya batas sosial etnis. Sebagai contohnya adalah permusuhan antara dua kelompok etnis berbeda, Serbia dan Bosnia yang perbedaan keduanya diperkuat dengan perbedaan agamanya. Perbedaan dua kelompok yang semakin nyata itu akan lebih mudah menyulut permusuhan sekaligus bila terjadi peperangan penyelesaiannya pun lebih sulit. Sulitnya pemecahan konflik seperti itu disebabkan oleh salinasi dan polarisasi pada kedua kelompok yang berjalan dengan intensitas tinggi. Kedua proses itu mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada sekaligus menutup atau memperkecil persamaan-persamaannya. Oleh karena itu tidak mengherankan bila dalam suasana konflik persamaan menjadi tidak berarti tetapi perbedaan menjadi sangat menonjol (Cook dan Curtin, 1987).

Pelanggaran batas-batas sosial bisa terjadi bila satu kelompok masyarakat tidak mempedulikan aspek-aspek kehidupan sosial kelompok lain. Sebagai contohnya adalah kasus perusakan rumah bordil atau pembunuhan terhadap pelacur yang beroperasi di lingkungan masyarakat *baik-baik*. Hal seperti ini antara lain pernah terjadi di Padang (Tempo, 3 Juli 1993) di mana terjadi pembunuhan seorang pelacur dilakukan oleh seorang warga desa yang tidak sudi kampungnya dikotori.

Beberapa uraian di atas menerangkan permusuhan pada level makro dalam arti kelompok masyarakat, meskipun bisa juga digunakan untuk menerangkan konflik pada level individu. Antara masalah-masalah kelompok dan individu bisa juga terjadi rasa permusuhan. Maksudnya, pada level individu dan level kelompok secara bersama-sama ada

masalah yang menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan dibahas juga tentang deprivasi relatif yang pada saat ini merupakan konsep yang tidak banyak dibahas. Namun demikian konsep itu sendiri merupakan topik lama yang pernah sangat populer pada akhir tahun enam puluhan. Konsep ini juga kurang begitu menarik perhatian para psikolog, namun bagi ahli sosiologi deprivasi relatif telah menjadi perhatian yang cukup mendalam.

Secara umum deprivasi relatif berarti perasaan kehilangan atau ketidak mampuan mendapatkan suatu objek sedangkan orang lain memperolehnya (Hogg dan Abrams, 1988, h. 38). Perasaan itu muncul karena menurut perhitungan orang yang bersangkutan mestinya ia bisa mendapatkan objek yang dimaksud. Di sisi lain ada orang yang kemampuannya sama tetapi tidak bisa mendapatkannya.

Teori deprivasi relatif pertama kali dikemukakan oleh Stoufer dan kawan-kawan ketika menemukan gejala itu di kalangan angkatan bersenjata Amerika Serikat. Pada waktu itu deprivasi dirasakan oleh satu angkatan karena sulit dalam kenaikan pangkat. Perasaan ini muncul karena mereka membandingkan dengan angkatan lain yang dengan mudah bisa naik pangkat. Pada perkembangan selanjutnya hal serupa juga dikaji pada subyek dengan pekerjaan-pekerjaan lain.

Teori deprivasi relatif akan mudah dipahami bila didahului dengan pemahaman tentang hubungan interpersonal, kategorisasi, identitas sosial, dan komparasi. Hal ini disebabkan oleh cakupan teori deprivasi relatif yang menekankan perbandingan antar individu dan juga antar kelompok.

Pada awalnya dikenal dua jenis deprivasi relatif (lihat Hogg dan Abrams, 1988). Pertama, deprivasi relatif egoistis yaitu deprivasi akibat perbandingan sosial dengan individu-individu lain yang relatif sama. Deprivasi ini juga bisa terjadi bila seseorang membandingkan dirinya secara aktual dengan keadaan yang diinginkan. Kedua, deprivasi relatif fraternal yaitu deprivasi akibat perbandingan sosial dengan individu lain yang berbeda atau antara kelompok sendiri dengan kelompok yang lain. Pada perkembangannya

(lihat Walker dan Petigrew, 1984), mungkin juga terjadi deprivasi ganda yaitu deprivasi akibat merasa lebih rendah atau kalah dalam perbandingan dengan kelompoknya maupun dengan kelompok lain. Dengan kata lain secara fraternal maupun egoistis seseorang mengalami deprivasi. Secara skematis tipe-tipe deprivasi bisa dilihat seperti pada tabel.

Tabel 1. Jenis-Jenis Deprivasi

		Pencapaian diri dibanding <i>outgroup</i>	
		lebih besar/sama	lebih kecil
Pencapaian diri dibanding <i>ingroup</i>	lebih besar/sama	<i>doubly gratified</i>	<i>fraternally deprived</i>
	lebih kecil	<i>egoistically deprived</i>	<i>doubly deprived</i>

Sumber: Walker dan Petigrew, 1984

Apakah deprivasi bisa menyebabkan munculnya permusuhan atau kekerasan? Secara teoritis deprivasi, terutama deprivasi fraternal dan deprivasi ganda, sangat potensial membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan kericuhan antar kelompok (Walker dan Petigrew, 1984). Asumsinya, kerusakan dalam masyarakat sering dilandasi oleh alasan jelas, masuk akal, dan terencana. Apalagi bila hal itu diwarnai oleh prasangka sosial yang buruk.

Deprivasi relatif sangat potensial menyulut permusuhan antar kelompok karena hal itu menyangkut prinsip keadilan (lihat Master dan Smith, 1987). Sementara itu keadilan adalah salah satu hal yang melandasi interaksi sosial sekaligus hal yang selalu dicari. Ketika prinsip-prinsip keadilan tidak lagi berlaku, maka interaksi sosial tidak bisa berjalan secara wajar. Permusuhan dan pertentangan antar individu maupun antar kelompok mudah sekali terjadi. Sementara itu prinsip-prinsip untuk menyelesaikan masalahnya tidak ada.

2.3. Mengatasi Prasangka dan Permusuhan

Sering muncul anggapan bahwa prasangka dan permusuhan adalah suatu hal yang biasa dan terus-menerus muncul, sehingga usaha untuk menghilangkan atau mencegahnya dianggap kurang perlu. Pandangan yang pesimistis seperti itu tentu sulit dibenarkan. Bahwa secara historis terus terjadi permusuhan di muka bumi ini bukan berarti tidak terjadi perdamaian. Munculnya permusuhan dan perdamaian tidak statis pada suatu tempat tetapi bergeser dari satu tempat ke tempat lainya.

Prasangka dan permusuhan dalam skala yang relatif besar sifatnya selalu berbau politis. Oleh karena itu dalam lingkup yang besar untuk menanggulangi prasangka dan permusuhan juga melalui politik (Hogg dan Abrams, 1988). Hal ini sangat mudah muncul dan relevan untuk ditanggulangi bila faktor mayoritas dan minoritas dalam interaksi sosial muncul. Bentuk keputusan politis mana yang efektif untuk menanggulangi prasangka dan permusuhan tidak akan dibahas dalam kajian ini, namun ide-ide yang mendasarinya bisa dikemukakan di bagian.

Dalam konteks interaksi sosial, usaha awal yang harus ditempuh pertama-tama harus dalam konteks hubungan antar kelompok. Mengingat bahwa dalam hubungan antar kelompok ini prasangka dan permusuhan timbul karena ada kekuatan-kekuatan unggul yang menekan kelompok yang lemah, maka usaha pertama yang perlu dilakukan adalah mereduksi perbedaan kekuatan sosial yang menyolok menjadi lebih seimbang.

Salah satu nilai sosial yang penting dalam kebudayaan Jawa adalah kerukunan. Suatu keadaan masyarakat disebut rukun bila semua pihak berdamai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, bersatu dalam suasana tenang dan sepakat. Konflik dan permusuhan dalam masyarakat Jawa dilihat sebagai suatu gangguan terhadap kerukunan (Magnis-Suseno, 1985). Untuk menjaga kerukunan itu caranya bisa dilakukan dengan musyawarah. Selanjutnya musyawarah bisa berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan sesuatu yang baik pula bila dalam musyawarah itu ada kekuatan yang seimbang dan tidak ada pihak yang berusaha memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lain.

Lebih lanjut Magnis-Suseno menyebutkan bahwa pencegahan konflik pada masyarakat Jawa dilakukan melalui tiga tingkatan, yaitu tekanan sosial, kondisionasi, dan melalui nilai-nilai etis.

Tekanan sosial yang umum digunakan dalam masyarakat Jawa adalah permintaan kesediaan untuk menomor duakan atau bahkan meninggalkan kepentingan individual demi kepentingan bersama. Asumsi yang melandasi usaha ini adalah keyakinan bahwa konflik dan permusuhan muncul bila ada kepentingan-kepentingan yang bertabrakan. Untuk menghindari adanya tabrakan itu maka salah satu harus mengalah, dalam hal ini yang harus mengalah adalah kepentingan individu sedangkan kepentingan masyarakat bersama harus dimenangkan.

Perlu dikemukakan bahwa kepentingan bersama adalah hasil musyawarah. Dengan demikian tidak bisa seseorang mengatasnamakan kepentingan bersama tanpa ada musyawarah terlebih dulu. Untuk menilai apakah kepentingan bersama itu benar-benar merupakan hasil musyawarah yang benar maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, meliputi toleransi, demokrasi, dan keadilan secara bersama-sama.

Cara kedua untuk mengatasi permusuhan adalah kondisionasi psikis (*psychological conditioning*). Berbagai bentuk kondisionasi yang dilakukan orang Jawa antara lain dengan mengajarkan untuk *isin*. Orang yang merasa dewasa harus *ngerti isin*. Di samping itu disosialisasikan juga untuk mempunyai rasa *sungkan*, yaitu perasaan malu positif bila berhadapan dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi (Magnis-Suseno, 1985, h. 98).

Dari contoh dua cara kondisionasi di atas, anak Jawa diarahkan untuk bisa menjaga diri sekaligus menghormati orang lain. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keserasian sosial dan menghindar dari munculnya sikap-sikap permusuhan. Sebab menentang dan memusuhi orang lain akan bertentangan dengan perasaan-perasaan tersebut di atas.

Usaha ketiga adalah dengan melalui nilai-nilai etis. Sikap-sikap orang Jawa yang dinilai tinggi adalah menghindar dari pamrih atau mengusahakan kepentingan

individualnya. Untuk itu manusia harus *sepi ing pamrih*. Dengan sikap ini diharapkan manusia tidak gelisah dan mampu mengontrol nafsu-nafsunya.

Nilai lain yang ditekankan dalam masyarakat Jawa adalah *nrimo*. Sebagai sikap positif, *nrimo* berarti tabah menjalani suatu proses dan menerima kesulitan, bukan kesediaan menerima apa adanya dengan apatis. Sikap ini dinilai sangat penting untuk menghadapi keadaan buruk. Di samping itu sikap ini juga akan mengembangkan kerelaan dalam melepaskan sesuatu dengan penuh pengertian.

Bila diamati secara keseluruhan tiga macam usaha mencegah munculnya permusuhan menurut masyarakat Jawa, faktor terpenting adalah unsur **memberi** atau mengutamakan orang lain. Dengan kata lain ada usaha mencegah atau menghindar bila ada masalah yang mengarah pada permusuhan.

Sedikitnya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan bila akan menerapkan konsep pada masyarakat Jawa itu secara lebih luas. Pertama, berbagai kelompok etnis di Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan yang menyolok dalam tatanan sosialnya. Oleh karena itu tatanan sosial suatu kelompok akan sulit untuk diterapkan di kelompok lain. Kedua, perubahan sosial terjadi begitu cepat sehingga nilai-nilai sosial juga ikut berubah. Apakah konsep Jawa tentang penanggulangan konflik sosial masih bisa diterapkan sekarang? Kritik ini tidak sekedar pesimisme tetapi untuk membangkitkan pemikiran lain, baik sebagai alternatif maupun sebagai komplemen.

Menurut teori identitas sosial, orang-orang yang memiliki identitas yang sama tidak mudah saling bermusuhan pada waktu mereka merasa sama-sama merasakan adanya identitas itu. Berangkat dari asumsi ini, permusuhan bisa dihindarkan bila pihak-pihak yang berpotensi saling bermusuhan memiliki identitas yang sama. Konsep ini bisa juga diterapkan untuk mendekatkan dua kelompok yang identitasnya berbeda. Caranya adalah dengan jalan mencari kesamaan-kesamaan di antara kelompok yang berbeda tersebut. Bila pada masing-masing identitas itu sulit dicari kesamaannya, maka bisa dilakukan dengan mencari identitas yang posisinya *lebih tinggi*. Misalnya, dua kelompok dalam satu partai

saling bermusuhan. Pertikaian itu bisa diredakan bila identitas kepartaiannya diperkuat, bukan polarisasi identitas kelompok-kelompok dalam partai. Karena dalam kehidupan sosial selalu ada identitas yang mengikat secara luas anggota masyarakat itu, maka untuk menjaga agar tidak terjadi permusuhan bisa dilakukan dengan menghindari terjadinya polarisasi di dalam masyarakat itu.

BAB III

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan tentang prasangka dan permusuhan. Kajian literatur yang akan dilakukan meliputi dua hal, yaitu kajian teoritis dan kasus-kasus yang relevan. Kajian teoritis akan banyak mengandalkan kajian *textbook* dan terbitan berkala ilmiah, sedangkan kasus-kasus yang dibahas akan dicari dari sumber-sumber berita majalah berita mingguan Tempo.

Sesuai dengan prosedur yang biasa dipakai dalam studi kepustakaan, maka penelitian ini juga akan menggunakan kaidah-kaidah umum dalam kajian kepustakaan seperti analisis kritis. Sedangkan kasus-kasus yang dianalisis akan dikaji secara kualitatif dengan metode studi kasus.

Penelitian kasus dilakukan dengan menggunakan majalah mingguan Tempo sebagai sumber data. Dari beberapa kali terbitan pada tahun 1992 dan 1993 dipilih beberapa kasus yang menggambarkan prasangka dan permusuhan seperti diuraikan dalam telaah teori. Dengan demikian pemilihan kasus sifatnya *purposive* atau disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Tidak semua kasus prasangka dan permusuhan yang ada dalam terbitan Tempo pada tahun 1992 dan 1993 dikutip dan dianalisis. Sebagian yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus-kasus yang diuraikan secara jelas, baik penyebabnya maupun urutan kejadiannya. Ada beberapa kasus yang tidak memiliki kriteria tersebut disertakan dalam analisis dalam rangka memperjelas kasus lain. Dengan kata lain, fungsi pencantuman kasus yang tidak diuraikan secara lengkap adalah untuk menguatkan analisis kasus lain.

Kasus-kasus tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan kerangka teoritis yang diuraikan. Prinsip dasar dalam analisis kasus-kasus yang ditemukan adalah mencocokkan peristiwa tersebut dengan teori yang ada, baik dari sudut penyebab, dinamika, bentuk-bentuk perilaku, maupun akibatnya. Diharapkan beberapa perspektif yang melandasi teori-teori yang telah diuraikan bisa ditemukan dalam kasus. Namun demikian

tidak tertutup kemungkinan bahwa dari sekian kasus yang akan dikaji tidak bisa diterangkan dengan kerangka teori tertentu. Bila hal ini terjadi bukan berarti teori tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di Indonesia, namun hal itu lebih banyak disebabkan oleh terbatasnya kasus yang ada pada sumber berita.

HASIL-HASIL PENELITIAN

Secara garis besar kajian terhadap kasus-kasus prasangka dan permusuhan dari majalah Tempo sebagai sumber informasi didapatkan tiga kelompok kasus prasangka dan permusuhan. Di antara ketiga kelompok tersebut, kelompok kasus kedua terdiri dari beberapa kasus dianalisis sekaligus karena memiliki kemiripan dan data-data kasus satu dengan lainnya saling melengkapi.

4.1. Kasus I (Tempo, 22 Agustus 1992)

Encub adalah seorang petani di Desa Karang Papak, Sukabumi. Ia seorang laki-laki dan berumur 35 tahun. Di samping bertani ia juga dikenal penduduk sekitar desa itu suka membantu menyembuhkan penyakit yang diderita warga setempat. Dalam membantu penyembuhan itu ia menggunakan obat-obat tradisional, bukan menggunakan cara-cara mistik seperti dukun pada umumnya.

Encub pernah kawin lebih dari sekali. Istri terakhirnya bernama Ilis. Istri Encub sebelum Ilis meninggal tanpa sebab yang jelas. Kematianya dicurigai oleh kakak Ilis yang bernama Maryati dan suaminya yang bernama Samsudin. Kecurigaan tersebut berlanjut menjadi pertengkaran antara Samsudin dengan Encub. Beberapa waktu setelah pertengkaran tersebut, Maryati menderita sakit dan ayahnya meninggal dunia. Samsudin curiga bahwa sakit istrinya dan meninggalnya mertua itu disebabkan oleh teluh yang dilakukan Encub. Sementara menurut pendapat beberapa orang di sekitar tempat itu, Maryati sebenarnya sakit TBC yang sudah menaun sehingga tidak mengherankan bila beberapa hari terakhir ia muntah darah. Namun demikian kecurigaan Samsudin terhadap Encub tetap tinggi.

Kebencian Samsudin kepada Encub mengarah ke rencana pembunuhan. Berdasarkan tuduhan bahwa Encub menyantet istrinya dan beberapa warga lain, Samsudin meminta beberapa orang untuk membunuh Encub dengan imbalan uang. Pembunuhan

terhadap Encub pun berlangsung secara sadis. Ia dipenggal kepalanya dan kemudian kepala tersebut dikubur secara terpisah dari tubuhnya.

Kasus pembunuhan dengan alasan seperti di atas sering terdengar di Indonesia. Berbagai media massa banyak memuat berita-berita seperti itu. Bagi sebagian anggota masyarakat santet dianggap benar-benar ada, sehingga beberapa ahli hukum juga percaya terhadap delik kejahatan dengan latar belakang santet. Mereka merasa perlu ada peraturan agar santet bisa diperkarakan di pengadilan. Penelitian ini tidak mengarah pada argumentasi keberadaan santet. Peneliti menempatkan diri pada posisi yang moderat, yaitu tidak mengingkari bila memang benar-benar ada santet, tetapi mendahulukan kajian rasional dalam berbagai analisis serupa. Oleh karena itu untuk sementara masalah kebenaran tuduhan santet mencelakakan seseorang untuk sementara tidak dimasukkan dalam analisis.

Dengan menggunakan teori yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, Samsudin bisa dikatakan cenderung *closed mind*. Dia tidak mengkaji secara jernih permasalahan yang dihadapi istrinya. Apabila dia menyadari atau mau mengakui bahwa telah beberapa waktu istrinya menderita sakit, maka bisa dimengerti bila keadaannya menjadi buruk. Kecurigannya terhadap Encub makin besar karena mereka bertengkar. Permusuhan tersebut menempatkan Samsudin pada posisi *unggul* atau *kalah*. Ia berpendapat bahwa dalam posisi demikian dia harus unggul. Untuk bisa mengungguli maka perlu ditunjukkan secara nyata. Akan tetapi secara normatif membunuh orang yang tidak disukai tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu ia mencari legitimasi perbuatannya bila kelak terlaksana. Menurut pendapat Rokeach dkk. (1960), salah satu cara justifikasi untuk memusuhi orang lain adalah dengan mencari perbedaan nilai-nilai. Dalam kasus di atas, Samsudin menonjolkan tuduhan santet yang dilakukan Encub sebagai perbuatan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang dianggap negatif. Nilai tersebut tidak selayaknya dikembangkan. Oleh karena itu dapat dikatakan layak bila orang yang memiliki nilai tersebut dimusuhi.

Kasus tersebut tidak sepenuhnya bisa dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Adorno dkk. (1950). Pada diri Samsudin memang ada karakteristik otoriter dalam arti ingin menguasai orang lain, terutama setelah terjadi pertengkaran. Di samping itu sikap otoriter mungkin juga berkembang sebagai akibat dari kondisi yang menekan dirinya dan keluarganya, terutama istrinya yang menderita sakit cukup lama. Akan tetapi pemaparan kasus dalam media massa tersebut tidak mengemukakan berbagai hal yang erat berkaitan dengan latar belakang pribadi yang mengarah ke karakteristik otoriter.

4.2. Kasus II

Kasus kedua terdiri dari beberapa kejadian yang memiliki kesamaan-kesamaan. Untuk mempermudah analisis beberapa kejadian tersebut disejajarkan. Kejadian pertama dikutip dari Tempo, 17 Juli 1993.

Pada sekitar minggu kedua bulan Juli 1993 di Batam diberlakukan jam malam. Polisi dan tentara melakukan patroli secara intensif. Penjagaan keamanan yang ketat ini dilakukan karena ada perkelahian antara dua kelompok pemuda. Kelompok pertama adalah pemuda kampung Batu Aji sedangkan kelompok kedua para sopir taksi.

Kerusuhan berawal dari pemotongan gaji seorang satpam di lapangan golf Marina City bernama John yang berasal dari Flores. Alasan pemotongan gaji adalah karena John tidak masuk kerja dan mencuri 10 buah lampu. John tidak bisa menerima perlakuan itu dan mencurigai orang kepercayaan pemilik lapangan golf itu, bernama Mon yang berasal dari Bukit Tinggi, sebagai pemitnah. John kemudian memukul Mon sebagai pelampiasan kemarahannya.

Pekerjaan pokok Mon adalah sopir taksi. Pemukulan terhadap Mon oleh John dinilai oleh sopir-sopir taksi kawan Mon sebagai perilaku tidak benar. Mereka kemudian mendatangi rumah John dan mengancamnya. Mendengar ancaman tersebut kawan-kawan John menjadi marah juga. Mereka melempari taksi yang lewat di kampung Batu Aji. Para sopir taksi pun tidak tinggal diam. Mereka balik menyerang kampung Batu Aji. Rupanya

rencana serangan itu sudah terdengar oleh pemuda Batu Aji. Mereka lalu bersiap-siap untuk menyambut kedatangan para sopir taksi dengan membawa senjata tajam dan terjadilah perkelahian massal. Ada beberapa orang yang menjadi korban, tetapi tidak ada keterangan berapa jumlahnya.

Meskipun aparat keamanan kemudian mengambil tindakan, suasana tegang tetap terasa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kecurigaan pemuda Batu Aji terhadap orang yang lewat. Mereka siap untuk *berperang* dan menanyai orang-orang yang lewat yang dinilai mencurigakan. Ada isu juga bahwa pemuda dari daerah Bukit Tinggi dan Flores di sekitar Batam berdatangan untuk membantu pihak masing-masing yang terlibat dalam permusuhan itu.

Bila dikaji, maka permusuhan antara sopir taksi dengan sekelompok warga desa pada akhirnya merupakan permusuhan antara dua kelompok. Hal yang menarik dari dua kelompok tersebut adalah identitasnya. Masing-masing kelompok memiliki dua identitas yang menonjol sekaligus. Kelompok pertama adalah kelompok sopir taksi sekaligus beridentitas daerah asal Bukit Tinggi. Kelompok kedua beridentitas warga Batu Aji dan asal daerah Flores.

Dilihat dari identitasnya maka ada perbedaan yang jelas antara kelompok pertama dengan kelompok kedua. Perbedaan ini membawa ke klasifikasi *ingroup-outgroup*. Terbentuknya klasifikasi ini bisa karena sejak awal atau sebelum terjadinya pemukulan terhadap salah satu anggota kelompok memang sudah ada perbedaan identitas, bisa juga tumbuh semenjak ada kasus pemukulan. Tampaknya perbedaan *ingroup* dan *outgroup* pada dasarnya sudah ada dan makin menonjol setelah terjadi permusuhan itu. Hal ini dibuktikan dengan cepatnya reaksi sopir taksi dengan jalan membalas pemukulan tersebut secara beramai-ramai.

Perihal identitas sosial kiranya sangat menonjol dalam kasus di atas. Pada kasus berikut yang akan diuraikan (dalam Tempo, 22 Mei 1993), identitas sosial juga sangat menonjol. Kasusnya adalah sebagai berikut.

Permusuhan antara penduduk desa Nuweletetu dan Sepa di Maluku Tengah konon sudah berlangsung lama. Dikabarkan bahwa dua warga desa tersebut saling mendendam karena sering bertikai. Penyebab utamanya diperkirakan karena masalah batas dua desa tersebut. Secara administratif atau pemerintahan masalah itu barangkali dianggap selesai. Namun ikatan kekerabatan di masing-masing desa itu sangat kuat, sehingga masalah batas desa masalah batas kekerabatan.

Kerusuhan bermula dari perusakan pagar kebun kopi seluas 20 hektare milik warga desa Sepa yang berbatasan langsung dengan desa Nuweletetu. Untuk menyelesaikan masalah perusakan pagar tersebut, pemiliknya dengan ditemani dua orang warga desa Nuweletetu mendatangi kepala desa Sepa. Ternyata kepala desa tidak ada di tempat dan warga Sepa itu diterima oleh seorang tokoh masyarakat desa Nuweletetu. Menurut pihak warga desa Sepa, tokoh masyarakat tersebut menolak musyawarah dan malah menantang. Tantangan itu tidak diladeni, namun di tengah perjalanan pulang ke Sepa ketiga orang itu dikeroyok 10 pemuda Nuweletetu. Salah satu warga Sepa terluka parah karena dikeroyok.

Mengetahui perlakuan warga desa Nuweletetu yang demikian, warga Sepa marah sekali. Mereka kemudian menyerang desa Nuweletetu. Dalam perkelahian massal yang menggunakan senjata tajam itu warga desa Nuweletetu kalah dan mundur ke hutan. Para penyerbu dari desa Sepa masih penasaran. Mereka lalu membakar rumah-rumah yang ditinggal penghuninya. Di samping kerugian harta benda itu, korban juga berjatuhan, terutama penduduk Nuweletetu.

Untuk mengatasi kerusuhan itu satu regu Polsek ternyata mengalami kegagalan. Lalu pihak keamanan mendatangkan 100 tentara untuk memulihkan keamanan di dua desa itu. Sekitar 200 polisi dan tentara kemudian berjaga-jaga selama beberapa hari.

Di samping perbedaan teritorial permusuhan antara dua desa di atas juga diwarnai oleh perbedaan marga. Kedua identitas tersebut pada dasarnya sudah ada sebelum terjadi kasus yang menyebabkan terbunuhnya beberapa warga desa dalam suatu kerusuhan. Pertentangan kedua kelompok menjadi berkobar setelah ada konflik yang batas wilayah

atau teritori. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa identitas sosial antara dua kelompok di atas sangat kentara dan identitas itu berbeda tidak hanya karena secara psikologis memiliki batas, yaitu marga, tetapi juga memiliki batas fisik. Dengan demikian teori identitas sosial (Tajfel, 1980) bisa diterapkan untuk memahami konflik sosial. Sementara itu pecahnya konflik itu sendiri ditandai oleh pelanggaran terhadap batas wilayah yang sekaligus merupakan batas sosial (lihat Sairin dan Semedi, 1992).

Permusuhan antara dua desa juga pernah terjadi di Sumatera Selatan, yaitu antara warga Desa Rantaukadam dengan Desa Karangkapo (Tempo, 17 April 1993). Korbannya antara lain seorang anggota DPRD yang kebetulan lewat di salah satu desa tersebut.

Penyebab pokok dari peristiwa itu kurang jelas. Sejauh ini baru terungkap bahwa penyebabnya adalah permusuhan antar individu dari dua warga desa yang berbeda tersebut. Masing-masing warga desa kemudian membela kawannya. Kasus ini tampaknya satu bukti nyata dari *minimal group phenomenon* dan masih sulit dianalisis dengan menggunakan teori identitas sosial.

Minimal group phenomenon dalam batas tertentu ada persamaannya dengan kesetia kawan. Kedua konsep tersebut memiliki kesamaan dalam arti keduanya memiliki ciri-ciri adanya usaha menguntungkan atau membela kawan dari kelompoknya. Kesetia kawan yang mengarah pada permusuhan dengan kelompok lain juga terjadi di Sumatera Selatan ketika seorang tentara anggota Batalyon Infanteri Tanjungenim dikeroyok polisi dari Markas Polisi Sektor Tebingtinggi. Kesetia kawan tersebut kemudian diwujudkan dengan melakukan balas dendam dengan menyerang Mapolsek Tebingtinggi oleh sekelompok tentara dari Yonif Tanjungenim. Hampir mirip dengan peristiwa itu, di Bandung sekelompok polisi dan tentara juga pernah *bertempur* (Tempo, 5 September 1992). Menurut berita yang disebar luaskan, peristiwa tersebut berawal dari pertikaian antara dua orang yang masing-masing berasal dari kesatuan yang berbeda, yaitu Angkatan Darat dan Kepolisian.

Tampaknya sekedar kesetia kawan-an ataupun *minimal group phenomenon* tidak selalu dinilai cukup untuk menyulut permusuhan. Karakteristik otoriter pada sekelompok orang yang terlibat dapat mempertajam rasa permusuhan atau usaha untuk melakukan kekerasan. Hal inilah yang terjadi di Maospati, Magetan, Jawa Timur pada sekitar bulan Agustus 1993 (Tempo, 4 September 1993). Beberapa orang anggota TNI Angkatan Udara memukuli sopir bis yang lewat di sekitar pangkalan tempat mereka tinggal gara-gara salah satu bis menabrak dua orang wanita istri perwira TNI AU di tempat itu. Kematian itu menyulut kemarahan yang ditumpahkan dengan melakukan pemukulan terhadap para sopir.

Pada kasus ini ada dua kelompok, yaitu para sopir dan anggota TNI AU, dengan perbedaan otoritas dan kekuatan yang menyolok. Pemukulan yang dilakukan tersebut mengandung unsur unjuk kekuasaan pada pihak TNI AU kepada para sopir. Tidak adanya perlawanan dari para sopir kiranya disebabkan oleh karena mereka sadar bahwa kekuatan yang dimiliki tidak seimbang bila dibanding dengan kekuatan pihak yang memusuhi. Di sisi lain pihak yang memukul berani melakukan itu karena mereka yakin bahwa kekuatan yang dimiliki cukup besar. Sesuai dengan pendapat Adorno dkk. (1950), tindakan yang berkarakteristik otoriter pada umumnya ditunjukkan kepada pihak yang kekuatannya lemah. Itulah sebabnya anggota TNI AU berani melakukan pemukulan terhadap para sopir bis yang lewat di sekitar tempat tinggal mereka.

4.3. Kasus III (Tempo, 27 Maret 1993)

Tanggal 24 Maret 1993 jatuh bertepatan dengan tahun baru Saka 1915. Pada hari itu umat Hindu menyambutnya sebagai hari raya nyepi. Beberapa cara merayakan hari itu antara lain tidak menyalakan api dan lampu, tidak membuat bunyi-bunyian, dan tidak melakukan bepergian selain berdoa. Pada hari itu di hampir seluruh wilayah Bali menjadi sangat sepi. Ada yang mengatakan hari itu Bali menjadi *kota mati*.

kelompok lainnya terjadi silih berganti. Tidak kurang dari 500 korban lain menyusul di beberapa tempat akibat upaya saling balas tersebut.

Cara penyelesaian masalah yang berpotensi menyulut konflik di atas ternyata mendekati konsep seperti yang dikembangkan pada masyarakat Jawa. Bahwa konsep tersebut tidak hanya ada pada masyarakat Jawa memang penekanan uraian pada bagian terdahulu itu tidak dimaksudkan untuk menonjolkan etnis tertentu, tetapi justru generalisasinya yang ditekankan, dalam hal ini eksistensi musyawarah dengan berbagai aspeknya.

Ada hal yang menarik dari kasus kerukunan yang terjadi di Bali itu. Ditinjau dari pandangan teori identitas sosial ternyata peristiwa itu berlangsung dalam suasana masing-masing kelompok memiliki identitas sosial yang menonjol. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan masing-masing kelompok berusaha untuk menurunkan kemenonjolan identitasnya. Padahal dalam wilayah itu juga ada kelompok mayoritas dan minoritas. Dengan kata lain, teori identitas sosial seperti tidak bisa menerangkan fenomena itu secara jelas. Namun satu pemikiran dari para ahli dalam teori identitas sosial yang menyebutkan bahwa penyelesaian masalah seperti itu bisa dilakukan secara politis tampaknya berjalan baik dalam menangani kasus seperti di atas.

Pemahaman penting yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan teori identitas sosial pada kasus di atas adalah dalam hal karakteristik peristiwa itu sendiri. Meskipun kedua perayaan dari kedua kelompok yang berbeda terjadi bersama-sama potensi konflik tidak muncul karena peristiwa itu hanya terjadi dalam waktu yang singkat, yaitu satu hari. Peristiwa itu tidak menonjolkan perbedaan karena pada waktu-waktu sebelumnya kedua kelompok sudah berinteraksi dengan baik. Dalam keadaan demikian tidak terjadi polarisasi yang menonjol. Oleh karena itu perbedaan perayaan yang hanya berlangsung sehari juga tidak perlu menjadi sumber masalah yang menonjol.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam literatur, pembicaraan prasangka cenderung ke prasangka negatif daripada sebaliknya. Bahkan prasangka positif jarang menjadi pokok bahasan. Demikian juga dalam penelitian ini, pembahasan prasangka lebih banyak pada sisi negatifnya dan untuk sementara prasangka baik diabaikan.

Prasangka hanya bisa dipahami dalam konteks interaksi sosial, baik yang berbentuk interaksi antar individu maupun antar kelompok. Secara teoritis prasangka bisa dipahami sebagai fenomena yang melekat pada individu maupun gejala yang umum terjadi dalam kelompok. Teori-teori yang dikemukakan oleh Adorno dkk. (1950), Allport (1954), dan Rokeach (1960) lebih menekankan faktor individu dalam membahas prasangka. Sementara itu, Billig (1985), Tajfel (1982), dan Turner (1982) lebih banyak menganalisis prasangka dalam konteks hubungan antar kelompok.

Ada beberapa pandangan yang berbeda antara dua kelompok teori di atas, namun pada prinsipnya teori-teori tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya (lihat Billig, 1985; Faturochman, 1993). Hal ini makin jelas ketika teori-teori tersebut diterapkan untuk memahami realitas sehari-hari. Pada bagian terdahulu diperlihatkan bahwa ada kasus yang hanya bisa dipahami dengan menggunakan teori prasangka yang individualistis, sedangkan kasus lain lebih mudah dipahami dengan menggunakan kerangka berpikir yang berorientasi pada hubungan antar kelompok. Ada juga kasus yang bisa dipahami dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut.

Hubungan antara prasangka dengan permusuhan yang diwujudkan dalam tindak kekerasan telah ditunjukkan pada penelitian ini. Kedua konsep ini sesungguhnya tidak selalu berhubungan dalam bentuk sebab-akibat. Untuk menjadi bentuk permusuhan, prasangka yang sudah ada perlu diperkuat dengan faktor-faktor lain. Beberapa faktor yang potensial menimbulkan permusuhan adalah perebutan sumber daya, konflik batas sosial,

dan benturan struktur kebudayaan (Sairin dan Semedi, 1992). Di samping itu deprivasi relatif dan merasa diperlakukan tidak adil sering mengobarkan prasangka menjadi rasa permusuhan. Melihat bentuk hubungan yang seperti itu, prasangka menjadi berbahaya bila manifes dalam bentuk permusuhan.

Kasus-kasus yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prasangka dan permusuhan tidak hanya berbahaya tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara-cara penanggulangannya. Untuk menanggulangi hal itu, beberapa perspektif tentang prasangka dan permusuhan bisa dimanfaatkan. Bila menggunakan pandangan bahwa prasangka berkaitan dengan tipe kepribadian (Adorno dkk., 1950; Rokeach, 1960), maka usaha untuk menanggulangi hal itu akan melalui proses yang kompleks. Salah satu caranya ditunjukkan oleh Magnis-Suseno (1985), yaitu dengan melalui kondisionasi mulai dari masa anak-anak. Hal ini berbeda dengan masalah yang terjadi dalam konteks hubungan antar kelompok.

Kasus-kasus prasangka dan permusuhan antar kelompok memang tidak kalah bahayanya dibanding kasus antar individu, tetapi alternatif penyelesaiannya bisa sekaligus tanpa melalui perlakuan individu per individu. Prinsip musyawarah tampaknya bisa menjadi alternatif yang dipercaya banyak pihak sebagai cara yang cukup efektif. Dari kasus yang dipaparkan menunjukkan bahwa cara tersebut akan lebih efektif bila ada antisipasi terhadap munculnya masalah secara lebih awal. Artinya, musyawarah dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadi permusuhan bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Di samping musyawarah, penanggulangan permusuhan dapat dilakukan dengan membentuk identitas sosial yang menyatukan berbagai kelompok. Bila hal ini bisa terlaksana, maka langkah selanjutnya adalah menjaga agar tidak terjadi polarisasi yang mengakibatkan identitas kelompok-kelompok kecil tersebut lebih menonjol dibanding identitas kelompok besarnya.

5.2. Implikasi

Penelitian ini telah membahas beberapa kemungkinan cara untuk mengatasi prasangka dan permusuhan. Beberapa cara tersebut sudah ada yang diterapkan dan bisa terus diterapkan di masa yang akan datang. Berbagai bentuk usaha yang dilakukan oleh para pengambil kebijaksanaan juga telah terbukti memiliki efektivitas yang memadai. Di sisi lain fakta-fakta menunjukkan bahwa peristiwa yang menunjukkan permusuhan dan kekerasan terus terjadi. Hal ini tampaknya lebih banyak disebabkan oleh kurang intensifnya usaha-usaha tersebut, bukan karena tidak adanya usaha. Oleh karena itu saran yang bisa dikemukakan untuk pengambil kebijaksanaan adalah meningkatkan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya masalah tersebut tetapi tidak dengan cara menutup-nutupinya seperti yang selama ini dilakukan.

Di samping implikasi praktis untuk kebijaksanaan, penelitian ini juga bisa menjadi stimulasi untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Konsep-konsep yang telah dikemukakan dalam penelitian ini bisa digunakan untuk melakukan penelitian lain dengan menggunakan metode yang lain pula. Salah satu di antaranya adalah konsep tentang deprivasi relatif. Meskipun konsep tersebut telah dibahas dalam penelitian ini, ternyata tidak ada kasus yang bisa dijadikan contoh untuk membuktikan konsep tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena langkanya kasus-kasus tersebut, bisa juga karena metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan konsepnya. Oleh karena itu akan menarik juga untuk mencoba mengembangkan konsep tersebut untuk kasus lain disertai dengan pengembangan metodenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adorno, T.W., Frenkel-Brunswick, E., Levinson, D.J. and Sanford, R.N. (1950). *The Authoritarian Personality*. New York: Harper and Row.
- Allport, G.W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Babad, E.Y., Birnbaum, M. and Benne, K.D. (1983). *The Social Self: Group Influences on Personal Identity*. London: Sage.
- Billig, M. (1985). Prejudice, Categorization and Particularization: From a Perceptual to a Rhetorical Approach. *European Journal of Social Psychology*, 15, 79-103.
- Billig, M. (1973). Normative Communication in a Minimal In-tergroup Situation. *European Journal of Social Psychology*, 3, 339-343.
- Billig, M. and Tajfel, H. (1973). Social Categorization and Similarity in Intergroup Behaviour. *European Journal of Social Psychology*, 3, 27-52.
- Brewer, M.B. (1979). In-Group Bias in Minimal Intergroup Situation: A Cognitive-Motivational Analysis. *Psychological Bulletin*, 86, 307-324.
- Brewer, M.B. and Kramer, R.M. (1985). The Psychology of Intergroup Attitudes. *Annual Review of Psychology*, 36, 219-243.
- Budiman, A. (1993). Agama, Demokrasi dan Keadilan. Dalam Azis, M.I., Maula, M.J. dan Dharwis, E.K.H. (ed.) *Agama, Demokrasi dan Keadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Coole, T.D. and Curtin, T.R. (1987). The Mainstream and the Underclass: Why the Differences so Salient and the Similarities so Unobstrusive. Dalam Master, J.C. and Smith, W.P. (eds.). *Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation*. London: Lawrence Erlbaum Association.
- Crosby, F. and Gonzalez-Intal, A.M. (1984). Relative Deprivation and Equity Theories: Felt Injustice and the Undeserved Benefits of Others. In Folger, R. (ed.) *The Sense of Injustice: Social Psychological Perspectives*. New York: Plenum Press.
- Faturochman (1993). Prejudice and Hostility: Some Perspectives. *Buletin Psikologi*, 1, 17-23.
- Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. *Human Relations*, 7, 117-140.
- Hogg, M.A. and Abrams, D. (1988). *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. New York: Routledge.
- Lorenz, K. (1967). *On Aggression*. London: Methuen and Co. Ltd.
- Magnis-Suseno (1985). Konflik dan Harmoni: Pengelolaannya dalam Wawasan Indonesia. *Prisma*, 2, 89-102.

- Master, J.C. and Smith, W.P. (1987). *Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation*. London: Lawrence Erlbaum Association.
- Milner, D. (1981). Racial Prejudice. Dalam Turner, J.C. dan Giles, H. (eds.) *Intergroup Behaviour*. Oxford: Basil Blackwell.
- Mohamad, G. (1993). Catatan Pinggir: Korban. *Tempo*, 28, 40.
- Rokeach, M. (ed.) (1960). *Open and Closed Mind*. New York: Basic Books.
- Sairin, S. dan Semedi P. (1992). *Telaah Pengelolaan Kerasian Sosial dari Literatur Luar Negeri dan Hasil-Hasil Penelitian Indonesia*. Yogyakarta: Kerjasama Kantor Menteri Negara KLH dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Sherif, M. and Sherif, C.W. (1969). *Social Psychology*. New York: Harper and Row.
- Tajfel, H. (1982). Social Psychology of Intergroup Behaviour. *Annual Review of Psychology*, 33, 1-39.
- Tajfel, H., Billig, M.G., Bundy, R.P. and Flament, C. (1971). Social Categorization and Intergroup Behaviour. *European Journal of Social Psychology*, 1, 149-178.
- Tempo (22 Agustus 1992). Eksekusi Santet di Sukabumi. No. 25, h. 90.
- Tempo (5 September 1992). Mahkamah Militer, Pertempuran Ujung Berung. No. 27, h. 74.
- Tempo (27 Maret 1993). Takbir dalam Nyepi. No. 4, h. 85.
- Tempo (17 April 1993). Pembunuhan, Vonis Mati di Musirawas. No. 7, h. 88-89.
- Tempo (22 Mei 1993). Perkelahian, Perang Dua Desa. No. 12, h. 42-43.
- Tempo (3 Juli 1993). Pembunuhan, Matinya Seorang Pelacur. No. 18, h. 93.
- Tempo (17 Juli 1993). Perkelahian Pemuda, Jam Malam di Batam. No. 20, h. 41.
- Tempo (5 September 1993). Satu Sopir Sial, Semua Kena Getahnya. No. 27, h. 87.
- Turner, J.C. (1975). Social Comparison and Social Identity: Some Prospect of Intergroup Behaviour. *European Journal of Social Psychology*, 5, 5-34.
- Turner, J.C. (1981). The Experimental Social Psychology of Intergroup Behaviour. In J.C. Turner and H. Giles (eds.) *Intergroup Behaviour*. Oxford: Basil Blackwell.
- Turner, J.C. (1982). Towards a Cognitive Redefinition of the Social Group. In H. Tajfel (ed.) *Social Identity and Intergroup Relations*. Melbourne: Cambridge University Press.
- Walker I. and Petigrew, T.F. (1984). Relative Deprivation Theory: An Overview and Conceptual Critique. *British Journal of Social Psychology*, 23, 301-310.